

MASA DEPAN MADRASAH DALAM PERSPEKTIF KEPALA MADRASAH

Mutammam *

Abstract: This research is aimed to described the headmasters of Islamic school's (*Madrasah*) views and ideas on the Islamic schools' future in Indonesia, and explain why and how their views and ideas go on. Based on the thick description of three headmasters of Islamic school, it appears that according to them, the Islamic schools' future will not only be stronger and more prospective, but also be gloomy. Based on this understanding, it can be developed a hypothesis that Islamic school can develop better under the conditions: (1) get law protection; (2) free from managing dualism of national education; and (3) free from poison of ideology of science dichotomy. Finally, it recommends that other researchers continue this research with wider research, so that it can get generalization to develop formal theory of Islamic school.

Kata Kunci: Madrasah, Kepala Madrasah, Sumberdaya Pendidik

PENDAHULUAN

Menurut catatan Kementerian Agama (2007), jumlah Madrasah Ibtidaiyah (MI) mencapai 23.517 lembaga, 93 persen di antaranya swasta. Total Madrasah Tsanawiyah (MTs) ada 12.054 lembaga dengan 90 persen di antaranya swasta. Lalu, Madrasah Aliyah (MA) jumlahnya 4.687 lembaga, 86 persen di antaranya swasta. Sementara itu, menurut catatan Balitbang Kemendiknas (2000); dari 171.651 SD dan MI maka 21.454 atau 12% di antaranya adalah madrasah, dari 30.716 SLTP dan MTs maka 9.850 atau 32% persen di antaranya adalah madrasah, dan dari 11.478 SMU dan MA maka 3.578 atau 31% di antaranya adalah madrasah. Data tersebut menggambarkan, dilihat dari segi jumlah, keberadaan madrasah di Indonesia telah dan akan terus memainkan arti penting dalam menentukan warna pendidikan nasional.

Meski jumlahnya sangat signifikan, namun secara historis sejak Indonesia berdiri, madrasah tidak pernah menempati posisi sentral dalam sistem pendidikan nasional. Jika dibandingkan dengan posisi sekolah dalam sistem pendidikan nasional, selama ini posisi madrasah berada pada wilayah marginal dan tidak pernah menjadi *main issue* dalam wacana pendidikan nasional. Hal ini seolah-olah menegaskan bahwa madrasah tidak lebih dari suatu pelengkap yang keberadaan dan kehadirannya tidak sungguh-sungguh diperlukan. Kenyataan demikian tentu sangat disayangkan karena sesungguhnya satuan pendidikan bernama madrasah mempunyai peran yang signifikan dalam pencerdasan bangsa.

Penyebab utama marginalisasi madrasah adalah kebijakan dualisme struktural penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan nasional, yakni pendidikan sekolah berada dalam naungan Kementerian Pendidikan Nasional dan pendidikan madrasah berada dalam naungan Kementerian Agama. Dualisme struktural yang terus berlangsung sejak awal kemerdekaan hingga dewasa ini pada faktanya telah melahirkan perlakuan dikotomis dan tidak adil oleh pemerintah terhadap madrasah. Dikotomi yang mendorong perlakuan tidak adil tersebut dalam sejarah muncul dalam bentuk-bentuk seperti pengakuan yang tidak tulus akan status pendidikan madrasah. Dalam hal status pendidikan, misalnya: baru pada era Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) No. 2 Tahun 1989 madrasah mendapat pengakuan resmi setara dengan sekolah; dan semakin menguat pada era UU Sisdiknas No 20 Tahun 2003. Namun seperti ditemukan Bastian (2007), pengakuan resmi secara hukum akan status madrasah sebagai sama dengan sekolah ini belum mampu menghilangkan ketidakadilan perlakuan terhadap madrasah.

* Dosen STAIN Pekalongan, Jl. Kusuma Bangsa No. 9 Pekalongan.

Soal dana pendidikan, misalnya, penguasa cenderung berpihak pada sekolah umum daripada madrasah. Selama ini untuk mengembangkan pendidikan di madrasah bukan diambil dari alokasi dana Kementerian Pendidikan Nasional yang jumlahnya relatif memadai dibanding dana Kementerian Agama; akan tetapi diambil dari anggaran Kementerian Agama itu sendiri yang jumlahnya relatif terbatas. Dalam kaitan ini Supriyoko (2008) menyebutkan, untuk siswa SMPN yang jumlahnya 4.684.000 mendapatkan dana penyelenggaraan dan dana pengembangan sebesar 1.760 miliar rupiah dalam satu tahun hingga setiap anak rata-rata memperoleh subsidi sebesar Rp.376 (via Kemendiknas); sedang untuk siswa MTsNi yang jumlahnya 355.000 hanya mendapat dana penyelenggaraan dan dana pengembangan sebesar Rp.105 miliar sehingga setiap anak rata-rata memperoleh subsidi sebesar Rp.296 (via Kemenag). Informasi ini menggambarkan bahwa anggaran pendidikan bagi madrasah lebih 'sempit' dibandingkan dengan sekolah umum.

Di negara mana pun di dunia ini yang namanya dana pendidikan menjadi determinan kualitas pendidikan itu sendiri. Dengan dana yang terbatas tentu saja menjadikan sulit bagi madrasah untuk mengembangkan dirinya menjadi suatu lembaga pendidikan yang berkualitas. Kondisi seperti itu tentu saja menyebabkan mutu pendidikan yang tidak optimal. Dengan dana yang terbatas, tentu sulit bagi madrasah untuk memiliki dalam jumlah yang cukup guru-guru yang berkualitas. Padahal guru berkualitas adalah kunci utama mutu pendidikan. Data EMIS di Kementerian Agama beberapa waktu lalu menunjukkan bahwa hampir setengah, tepatnya 47%, guru madrasah masih termasuk di dalam kategori kurang berkualitas.

Keadaan guru yang kurang berkualitas tersebut masih diperburuk lagi dengan kualifikasi yang tidak sesuai dengan tingkatan madrasah serta spesialisasi yang tidak sesuai dengan disiplin ilmu. Di tingkat MI misalnya, sebanyak 63% gurunya ternyata lulusan SMA dan D1; padahal lulusan SMA sama sekali tidak disiapkan untuk mengajar di sekolah mana pun, termasuk madrasah. Sementara itu untuk mengajar di tingkat MI seharusnya sudah berkualifikasi D2 kependidikan, bukan D1. Pada sisi yang lain di MTs dan MA, didapatkan banyak guru yang terpaksa harus mengajar bidang studi yang bukan bidang keahliannya.

Pada faktanya, hingga dewasa ini pengakuan resmi secara hukum terhadap status madrasah sebagai setara dan sama dengan sekolah—seperti termaktub dalam UU No. 2 Tahun 1989 dan No 20 Tahun 2003—belum mampu menghilangkan ketidakadilan perlakuan terhadap madrasah. Dalam konteks inilah, suatu penelitian tentang pandangan dan gagasan para Kepala Madrasah mengenai masa depan madrasah menjadi penting untuk dilakukan. Melalui penelitian ini akan ditemukan bagaimana para Kepala Madrasah mengembangkan pandangan-pandangan dan gagasan-gagasan mereka mengenai masa depan madrasah di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif-fenomenologi untuk menggambarkan fenomena dan lebih berorientasi pada *theory generating* dari pada *theory testing*. Oleh sebab itu, penelitian ini mensyaratkan adanya *setting* alamiah dan kekayaan nuansa maka individu peneliti bakal terjun langsung ke lokasi penelitian, bertindak sebagai instrumen utama pengumpulan data. Begitu memasuki kancah penelitian, peneliti melakukan pengamatan untuk mendapatkan deskripsi tentang struktur sosial, mengamati pola-pola perilaku, dan pada saat yang sama berupaya memahami lingkungan madrasah sasaran penelitian.

Kehadiran peneliti secara langsung di lapangan demikian tentu memunculkan proses interaksi antar pribadi di antar peneliti dan partisipan penelitian. Di sini peneliti dituntut melakukan tindakan *bracketing* agar di sepanjang penelitian, melepaskan diri peneliti dari dominasi nilai personal dan prakonsepsi yang telah ada bisa terus terjaga. Dengan demikian, peneliti bisa melihat situasi di lapangan dengan perspektif yang baru. Jurnal harian yang memuat perasaan dan refleksi pribadi bakal amat membantu. Disamping mengandalkan observasi partisipan, wawancara mendalam sebagai prosedur pengumpulan data juga digunakan. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur. Hasil wawancara bakal direkam melalui pita kaset, untuk selanjutnya ditranskrip. Akhirnya, sebagai kelengkapannya digunakan pula dalam analisis dokumen.

Sumber data utama dalam penelitian ini adalah para Kepala Madrasah. Terutama disebabkan oleh faktor keterbatasan dana dan waktu yang tersedia, penelitian ini menetapkan hanya 3 (tiga) Kepala Madrasah di Jawa Tengah yang dipilih sebagai sumber data. Mereka adalah satu orang

Kepala MIN dan dua orang Kepala MIS Pertimbangan utama untuk menetapkan pilihan terhadap ketiganya sebagai sumber data adalah prestasi lembaga dan individu kepala madrasah.

Karena penelitian ini mensyaratkan adanya *setting* alamiah dan kekayaan nuansa, maka individu peneliti bakal terjun langsung ke lokasi penelitian, bertindak sebagai instrumen utama pengumpulan data. Selanjutnya, wawancara mendalam sebagai prosedur pengumpulan data dilakukan dengan sumber-sumber data sebagaimana tersebut di atas. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur. Hasil wawancara bakal direkam melalui pita kaset, untuk selanjutnya ditranskrip. Akhirnya sebagai kelengkapannya digunakan pula dalam analisis dokumen.

Analisis data dilakukan sejak awal selama dan sesudah pengumpulan data di lapangan. Begitu data terkumpul, segera saat itu dilakukan pengkodean dan analisis. Secara sirkular praktek demikian dilakukan pada tiga tingkat sehingga pada akhirnya melalui *constat comparative method* memungkinkan untuk pengembangan konstruk teoritis yang pada gilirannya vital bagi proses pemaknaan dan *theory generating*.

Metode perbandingan antara insiden dengan insiden, insiden dengan kategori, dan kategori dengan kategori atau konstruk dengan konstruk bakal dilakukan para peneliti untuk menetapkan kesamaan dan perbedaan di antara insiden kepemimpinan teramati. Komparasi atas insiden yang sama pada gilirannya menghasilkan rumusan konstruk proses kepemimpinan. Sementara komparasi atas insiden yang berbeda bakal berujung pada terbangunnya batas-batas *coding* dan hubungan antar kategori. Analisis komparatif demikian selanjutnya memaksa peneliti menemukan struktur kategori, temporalitasmua, konteks yang melingkupinya, dimensi-dimensi yang terkandung dan hubungan-hubungannya dengan kategori-kategori lain. Akhirnya, perbandingan antar pola pandangan dan gagasan para partisipan yang berbeda dalam area substantif madrasah di Jawa Tengah perlu dilakukan untuk menghasilkan pemahaman utuh tentang pandangan dan gagasan mereka mengenai masa depan madrasah di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pandangan Kepala Madrasah tentang Masa Depan Madrasah

Untuk kepentingan *understanding in detail the whole* madrasah sebagai entitas satuan pendidikan yang bersifat multifacet (berwajah jamak), harus diambil sejumlah jalan penghampiran secara sekaligus agar diperoleh pemahaman yang holistik. Tanpa melalui cara demikian, pemahaman yang nantinya diperoleh hanya bersifat parsial. Sementara untuk keperluan mendapatkan pemahaman yang bersifat parsial namun masih bersifat *in-depth understanding*, sejumlah pendekatan bisa dipilih untuk dilakukan. Pendekatan pertama yang bisa dipilih adalah menghampiri madrasah melalui tulisan-tulisan orang lain tentang madrasah. Dalam hal ini, telah terdapat ratusan karya ditulis orang mengenai madrasah. Pendekatan selanjutnya yang bisa juga dipilih adalah dengan datang secara langsung ke madrasah, melakukan observasi dan merekam segala hal yang teramati tentang madrasah. Di samping itu, masih ada pendekatan lain yaitu mewawancarai sejumlah eksponen madrasah mengenai madrasah.

Penelitian ini sendiri dilakukan tidak dengan kehendak untuk memahami secara holistik *in detail* keseluruhan wajah madrasah. Konsern utamanya adalah berupaya meng-*understanding-i* masa depan madrasah dalam pandangan kalangan-dalam madrasah. Dengan demikian, penelitian ini berkepentingan dengan *thick description* dari fenomena yang hendak dipahami. Karena yang hendak dipahami adalah pandangan manusia tentang masa depan madrasah, maka datanya adalah pandangan orang tentang madrasah dan bukan tentang masa depan madrasah itu sendiri.

Data lapangan menunjukkan, dalam pandangan para informan masa depan madrasah secara garis besar disebut prospektif namun sangat membutuhkan perhatian sungguh-sungguh. Penjelasan yang bisa diberikan untuk kesimpulan seperti itu adalah, berdasar pengetahuan dan pengalaman yang dimilikinya para informan meyakini bahwa madrasah memiliki masa depan yang tidak perlu diragukan. Seperti terungkap dalam pernyataan seorang informan:

... asal tahu saja, madrasah itu lembaga pendidikan yang dibangun oleh masyarakat, atas dorongan agama untuk *nasyrul ilmi*. ... sepanjang umat Islam di Indonesia masih kuat meyakini dan mengamalkan ajaran agamanya, maka saya yakin masa depan madrasah akan

tetap kokoh, seperti apa pun kondisinya. Akan selalu ada pihak yang membela dan memajukan madrasah.

Meski demikian, sebagaimana terungkap di bagian belakang nanti, para informan juga menegaskan bahwa kondisi bagi masa depan yang cerah tersebut menghajatkan perubahan cara pandang dan sikap yang diberikan pihak-pihak yang berbeda-beda terhadap madrasah.

Dari hasil wawancara-wawancara dengan para informan yang kesemuanya merupakan Kepala Madrasah, peneliti berhasil mengkonstruksi paling kurang 7 (tujuh) tema teoritis. Tema-tema tersebut merupakan aspek-aspek yang secara tidak sadar digunakan sebagai pintu masuk oleh para informan penelitian ini pada saat mereka mengungkapkan pandangan-pandangan mereka mengenai masa depan madrasah. Aspek-aspek tersebut sebagiannya mengandung kekuatan namun sebagian lain mengandung titik lemah masa madrasah. Ketujuh tema dimaksud adalah (1) aspek legal formal yang memayungi institusi madrasah, (2) dualisme pengelolaan pendidikan nasional yang kurang memadai, (3) aspek tenaga pendidik yang secara umum dimiliki madrasah pada dewasa ini, (4) aspek kelembagaan (institusional) madrasah, (5) aspek finansial atau sumberdaya keuangan yang melekat pada madrasah, (6) *community support* atau dukungan masyarakat, dan (7) aspek lulusan atau *out put* sumberdaya manusia yang dihasilkan madrasah.

1. Legalitas Formal Madrasah

Status legal formal yang disandang oleh madrasah dewasa ini diyakini para informan sebagai yang paling membuat mereka optimis melihat masa depan madrasah. Seperti diketahui, Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional paling mutakhir, yakni UUSPN No 20 Tahun 2003, memposisikan madrasah sebagai sama dengan sekolah. Dengan posisinya yang demikian, menurut para informan, madrasah memiliki *legal standing* sangat kuat sehingga madrasah memiliki jaminan kepastian masa depan. Dalam sebuah diskusi kelompok kecil (FGD) dengan para informan, seorang Kepala Madrasah informan bernama (samaran) Sofiudin menuturkan:

Menurut saya madrasah memiliki masa depan yang baik. Ini bukan semata-mata karena saya melakukan beladiri karena saya orang madrasah. Tapi setelah diundangkan UU No. 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional, khususnya pasal pasal 17 ayat 2 dan pasal 18 ayat 3, maka kalangan madrasah merasa berada di zona aman. Kalau dibaca kata per kata, sangat jelas sekali di situ, status madrasah tidak hanya diposisikan sebagai sederajat dengan sekolah umum, namun jelas-jelas sama persis dengan sekolah umum.

Kepastian status madrasah di mata hukum bahwa madrasah sama dengan sekolah merupakan puncak dari perjuangan yang sangat panjang. Perjuangannya sendiri sangat-sangat melelahkan. Dengan adanya status hukum sama dengan sekolah tadi, madrasah patut berharap bisa mendapat perhatian sama dengan sekolah dari pemerintah yang melaksanakan undang-undang. Madrasah sebagai yang mampu melahirkan generasi Indonesia berakhlak karimah yang menjadi pondasi kemajuan bangsa tentu harus mendapatkan perhatian dalam kapasitasnya sebagai lembaga pendidikan yang jelas-jelas memiliki hak untuk diperlakukan sama dengan sekolah tanpa diskriminasi sebagaimana tersurat di dalam UU Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003. ...

Dalam pandangan Sofiudin yang pernah menjadi guru teladan nasional, *legal standing* atau status hukum madrasah sama dengan sekolah merupakan *entry point* bagi pengembangan sikap optimisme dalam menatap masa depan madrasah. Seperti halnya Sofiudin, seorang informan lain bernama (samaran) Sri Irawati, menuturkan:

Selama bertahun-tahun kita di madrasah terjepit. Kesulitan berkembang karena kita secara diam-diam dipandang sebagai lembaga pendidikan kelas dua, bahkan lembaga pendidikan kampung yang tidak memiliki masa depan. Sebabnya adalah status kita yang tidak jelas, dalam undang-undang pendidikan tidak disebut sama sekali. Baru sekarang setelah masuk UUSPN sebagai sama dengan sekolah, maka kita jadi bisa tegak menatap masa depan kita sendiri di madrasah ...

Pandangan para Kepala Madrasah informan tentang masa depan madrasah yang cerah karena status "sama dengan sekolah," sebagaimana terwakili dalam penuturan Sri Irawati, lahir berdasar pengalaman mereka selama bertahun-tahun bergelut menghidup-hidupi madrasah. Irawati dan Sofiudin mendaku mereka tahu persis arti penting kepastian status hukum madrasah dalam undang-undang pendidikan nasional bagi masa depan madrasah. Bahkan seperti diceritakan Irawati yang membuat perumpamaan ekstrim, menjalankan roda madrasah tanpa status legal formal jelas seperti tahun-tahun sebelum era UU No 20/2003 adalah bagaikan memimpin kafilah di padang pasir di malam yang gelap:

Anda bisa bayangkan, bagaimana repotnya memimpin kafilah dagang bergerak berrombongan di padang pasir maha luas pada malam yang gelap tidak ada bintang menerangi sementara angin bertiup kencang. Begitulah kira-kira gambaran kami dulu di madrasah. Memimpin rombongan manusia berjalan menuju titik tertentu tetapi tanpa arah yang jelas, selalu kehausan dan kehabisan bekal sementara cuaca hukum dan cuaca politik nasional tidak bersahabat. ... mau minta bantuan kepada siapa, ... dulu itu seperti di tengah padang pasir, apa-apa serba minta bantuan kepada Allah karena tidak ada di sekitar kita orang lain yang bisa bantu kita ...

Para pembaca yang menguasai sejarah pertumbuhan dan perkembangan madrasah di Indonesia tentu mengiyakan pandangan para informan penelitian ini. Pada saat keberadaan madrasah tidak diakomodir dalam undang-undang pendidikan, maka madrasah dijauhi banyak pihak, tidak mendapat *back up* secara hukum dan politik. Pada saat itu banyak pihak, termasuk kalangan madrasah sendiri sebagaimana disampaikan para informan tadi, melihat madrasah merupakan lembaga pendidikan yang tidak memiliki masa depan.

Dewasa ini kondisinya telah berubah, madrasah tidak lagi menjadi lembaga pendidikan yang terlupakan. Seperti barusaja diungkap, secara legal formal madrasah tidak lagi dibedakan dari lembaga pendidikan umum. Pengakuan yuridis, sebagaimana diatur dalam pasal 17 dan 18 UUSPN No. 20 Tahun 2003, itu menjadi modal potensial bagi peningkatan kualitas madrasah dalam upaya pembangunan sektor pendidikan yang berkeadilan. Pertanyaannya sekarang, apakah kepastian status hukum sama dengan sekolah merupakan segala-galanya bagi kepastian keprospektifan masa depan madrasah?

2. Dualisme Pengelolaan Pendidikan Nasional

Sejak awal kemerdekaan, bahkan sejak jauh sebelum masa kemerdekaan, semua kisah tentang madrasah sebagai institusi pendidikan formal di Indonesia selalu berupa kisah tentang dualisme pengelolaan pendidikan nasional. Sementara pendidikan sekolah berafiliasi kepada Kementerian Pendidikan Nasional (dulu Departemen Pendidikan Nasional), pendidikan madrasah berafiliasi kepada Kementerian Agama (dulu Departemen Agama). Ibarat kisah sastra yang ditulis secara serial berjilid-jilid, kisah tentang dualisme tersebut bahkan secara empiris hingga dewasa ini masih terus ditulis oleh para pembuat dan pelaksana kebijakan pendidikan.

Jika kisah tentang perjalanan perubahan UUSPN dari waktu ke waktu, sejak tahun 1950 hingga tahun 2003, menghadirkan suasana penuh harapan di kalangan Kepala Madrasah terhadap masa depan madrasah, lain halnya dengan kisah tentang dualisme pengelolaan pendidikan nasional. Dalam pandangan para Kepala Madrasah seperti yang disuarakan tiga Kepala Madrasah yang menjadi informan, pembinaan madrasah sebagai lembaga resmi di bawah naungan Kementerian Agama dan pembinaan sekolah di bawah otoritas Kementerian Pendidikan Nasional sering menimbulkan kecemburuan. Nada kecemburuan ini bisa dibaca dari penuturan Badrul, nama (samaran) Kepala Madrasah informan lain, yang mengatakan:

Kalau dulu bolehlah pemerintah main diskriminasi, tapi kalau sekarang kan madrasah sudah masuk undang-undang pendidikan dan sama dengan sekolah, masak mau dijadikan anak tiri terus.

Mencoba menjelaskan apa yang dimaksud Badrul dengan istilah anak tiri untuk madrasah, Sofiudin menyatakan:

Madrasah tidak pernah menerima perlakuan sama dari pemerintah sebagai pihak yang seharusnya melaksanakan amanat undang-undang dengan adil. Mari saya tunjukkan, mulai dari alokasi dana, perhatian, pembinaan manajemen, bantuan sumber dan media pembelajaran, penyebaran penempatan guru, hingga pemberian beasiswa masa transisi dari satu madrasah ke madrasah di atasnya selalu tidak sama antara yang diterima oleh sekolah umum dengan madrasah.

Tema dualisme pengelolaan pendidikan nasional yang terkonstruksi dalam pikiran para Kepala Madrasah termasuk tema yang mengurangi potensi keprospektifan masa depan madrasah. Dalam bahasa Sofiudin, tingkat harapan terhadap masa depan madrasah yang lahir dari status legal formal yang kini melekat pada madrasah menjadi menurun lantaran masih dipeliharanya dualisme pengelolaan pendidikan nasional.

Saya sampai melakukan sujud syukur ketika UUSPN No. 20 Tahun 2003 memosisikan madrasah sama dengan sekolah. Saya melakukannya karena inilah pintu masuk bagi kejayaan madrasah di masa depan. ... harapan besar akan masa depan madrasah yang cemerlang ini terganggu oleh terus dipeliharanya warisan dualisme manajemen pendidikan nasional. ... saya merasa bersalah tidak segera berdemo membela Presiden Gusdur ketika beliau melontarkan ide pendidikan satu atap ... akibatnya sekarang madrasah masih mengalami diskriminasi dari pemerintah.

Sebagaimana tersurat dalam statemen Badrul Ulum di atas, dualisme telah menyebabkan madrasah diperlakukan bak anak tiri oleh pemerintah. Perlakuan diskriminatif terhadap madrasah seperti ditegaskan Sofiudin, telah meletakkan posisi madrasah berada pada wilayah marginal. Hal ini sangat disayangkan karena sebenarnya madrasah mempunyai peran yang signifikan dalam pencerdasan bangsa.

Statistik Pendidikan Agama dan Keagamaan (Kemenag, 2007) menyebutkan, diperkirakan pada tahun 2005/2006 jumlah siswa madrasah mencapai 5,5 juta orang dari sekitar 57 juta jumlah penduduk usia sekolah di Indonesia. Bisa dibayangkan berapa jumlah siswa madrasah di tahun 2010/2011 dewasa ini, jika peningkatan jumlah siswa madrasah dari tahun ke tahun rata-rata sebesar 4,3 %. Selanjutnya dari aspek partisipasi, menurut perkiraan Supriyoko (2008) "madrasah menempati sekitar 15 persen dari populasi anak sekolah di Indonesia." Dengan demikian, peran signifikan madrasah dalam pertumbuhan dan perkembangan pendidikan nasional di Indonesia tak terbantahkan.

Namun demikian, seperti dikemukakan Sofiudin lebih lanjut, perhatian pemerintah terhadap keberadaan madrasah masih sangat kurang:

Pengaruh buruk yang diterima madrasah sebagai akibat dualisme pengelolaan pendidikan nasional itu akan tampak dalam kasus kebijakan penganggaran dan pendanaan pemerintah terhadap subsidi per kapita bagi siswa madrasah dan sekolah umum. Sebagai contoh, tahun 2003 pada saat unit cost per anak per tahun untuk SMA mencapai sekitar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) para siswa Madrasah Aliyah (MA) hanya mendapat jatah Rp.4.000,- (empat ribu rupiah) atau satu persen jatah yang diterima siswa SMA.

Kisah tentang ketidakadilan pengalokasian anggaran pendidikan yang lebih memprioritaskan sekolah dengan mengabaikan madrasah nampaknya masih terus ditulis di negeri ini. Di antara bagian terbaru yang masih terus ditulis dari kisah ini dituturkan Sri Irawati:

Itu lho, Surat Edaran Mendagri tanggal 21 September 2005 No 903/2429/SJ melarang pemerintah daerah untuk mengalokasikan APBD kepada organisasi vertikal. Karena madrasah berada di bawah koordinasi Kementerian Agama yang termasuk organisasi vertikal, para Bupati kepala daerah cenderung memandang madrasah bukan anak kandung mereka, sehingga tidak perlu disediakan anggaran.

Sofiudin, Kepala MI yang pada saat wisuda program S2 menjadi lulusan terbaik di IAIN Semarang, mengungkap sisi lain dari kisah pahit dualisme pendidikan:

Dualisme manajemen pendidikan nasional juga menyebabkan beban belajar siswa madrasah menjadi lebih berat karena kurikulum madrasah menjadi 100% pelajaran non agama sekolah plus 100% pelajaran agama madrasah. Akibatnya rata-rata prestasi belajar siswa madrasah lebih rendah dibanding rata-rata prestasi belajar siswa sekolah.

Para informan nampak kuatir dengan masa depan madrasah saat mereka mendiskusikan dualisme dalam sistem pendidikan nasional yang terus dilestarikan pemerintah. Seperti terungkap dalam penuturan Sofiudin di atas, sebenarnya para Kepala Madrasah membayangkan pen-satuatapan pengelolaan pendidikan nasional di bawah naungan Kementerian Pendidikan Nasional akan memperkuat harapan masa depan yang cerah bagi madrasah. Bagi peneliti, pandangan para Kepala Madrasah bahwa pensatuatapan madrasah dengan sekolah lebih menjamin masa depan madrasah merupakan pandangan yang patut didengar dan dipertimbangkan kembali oleh kalangan Kemenag maupun Kemendiknas. Demikian, karena pandangan ini datang dari kalangan yang paling mengerti dengan seluk beluk pengelolaan madrasah, yang tentu saja merupakan pihak yang paling berharap dengan masa depan madrasah.

3. Tenaga Pendidik di Madrasah

"Lha, di MI saya yang gurunya 12 belum memiliki guru lulusan S1 Program Studi PGMI. Mereka yang S1 justru lulusan S1 Bahasa Inggris dan S1 Matematika," kata Sri Irawati mengenai sumber daya manusia di madrasahnyanya.

Di lingkungan satuan pendidikan di mana pun, tenaga pendidik atau guru memiliki pengaruh dominan bagi keberhasilan pendidikan. Dalam bahasa Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, untuk berhasil mendidik murid mencapai tujuan-tujuan pendidikan, harus tersedia tenaga pendidik yang memiliki kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi. Jika logika ini diterapkan pada pembicaraan tentang masa depan madrasah, maka untuk mencapai masa depan yang gemilang madrasah hajat kepada tersedianya guru-guru yang kompeten seperti yang dirumuskan Undang-Undang tadi.

Pernyataan Sri Irawati di atas ternyata mencerminkan fenomena yang muncul di sebagian besar madrasah. Bahkan data Statistik Pendidikan Agama dan Keagamaan di Kemenag (2007) menyebut angka 47%, guru madrasah termasuk dalam kategori guru kurang berkualitas. Data nasional tahun 2010/2011 tentu telah berubah, namun mengubah 47% dari total guru madrasah yang mencapai angka di atas 500.000 (setengah juta) orang dalam waktu 3 (tiga) tahun tentu tidak mudah dilakukan Kementerian Agama yang alokasi anggaran pendidikannya terbatas.

Mari kita perhatikan penuturan Sofiudin:

Sejak pak Harto lengser, tata kelola pemerintahan di negara kita kan berubah dari sentralistik menjadi desentralistik. Kita tahu perubahan sistem pengelolaan pemerintahan nasional tersebut selanjutnya telah disertai dengan desentralisasi pengelolaan bidang-bidang pelayanan publik seperti pendidikan dan kesehatan. ... desentralisasi pendidikan kemudian diterapkan dalam wujud implementasi MBS (manajemen berbasis sekolah). Pada perkembangan mutakhirnya, MBS dipertajam dengan implementasi kebijakan KTSP pada setiap satuan pendidikan negeri maupun swasta. ...

Sebagai Kepala Madrasah saya mengalami kesulitan memimpin implementasi KTSP yang sebagian besarnya disebabkan karena kondisi guru-guru yang ada di MI saya. Madrasah saya secara jumlah tidak kekurangan guru, namun secara kualifikasi memprihatinkan. Saya memang pernah dianugerahi gelar guru teladan nasional, namun teman-teman kerja di MI saya belum semua S1 itu pun masih terjadi *mismatch*. Coba sampeyan bayangkan, mereka mengalami kesulitan luar biasa pada saat harus menyusun kurikulum sendiri. Alasan simpelnya, mereka tidak memiliki kompetensi untuk itu ...

Kisah tentang guru-guru madrasah juga diceritakan Badrul. Saat menuturkan kisah tentang guru-guru di lingkungan madrasah, dia mengatakan:

Saya senang, teman-teman seperjuangan saya di madrasah yang saya gaji bulanan masing-masing orang yang mereka terima dari yayasan terhitung rendah, yaitu Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per bulan, mereka tidak pernah mengeluh. Ditambah dengan bantuan tunjangan fungsional dari Kemenag dan dari Pemda melalui Forum Guru Swasta (FORGUSTA) jatuhnya per sekitar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu) per bulan per orang.

Tidak kualifaid, *mismatch* dan bergaji rendah masih merupakan kenyataan yang melekat pada mayoritas tenaga pendidik di lingkungan sebagian besar madrasah. Para Kepala Madrasah informan tidak secara langsung menegaskan pengaruh situasi ini terhadap masa depan madrasah. Apakah dengan demikian mereka merasa situasi ini tidak mengancam masa depan madrasah?

4. Kelembagaan Madrasah

Ketika pertanyaan wawancara mulai bergeser menuju sisi organisasional madrasah, Sofiudin segera menyampaikan jawaban mendahului informan lain:

Saya ingat, Prof. Maksud dari Cirebon dalam disertasinya tentang madrasah menyebut madrasah di Indonesia berkembang merupakan respon terhadap kebijakan politik pendidikan pemerintah Hindia Belanda. Sejarah ini lantas mempengaruhi pertumbuhannya sampai sekarang yaitu kebanyakan madrasah adalah secara kelembagaan adalah swasta ...

Agak berbeda dari uraian Sofiudin, Badrul menekankan bahwa secara organisatoris kebanyakan madrasah lemah. Berikut adalah kutipan dari sebagian penuturan Badrul:

... seperti Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Insan Cendekia di Serpong Bogor yang kabarnya setiap tahun mendapat kucuran dana DIPA sebesar sekitar 5 (lima) milyar rupiah melalui dana APBN. Jangan tanya yang lain ... secara kelembagaan lemah ... hanya beberapa yang kuat secara kelembagaan.

Sedang informan lain, Sri Irawati, menyebut sangat banyak yayasan swasta yang memayungi madrasah seperti tidak sungguh-sungguh mengembangkan madrasah. Berikut sebagian penuturan Sri:

Berbeda dari sekolah yang negerinya banyak, madrasah negeri itu kan mungkin tidak sampai 15% dari keseluruhan jumlah madrasah. Madrasah-madrasah swasta dikelola oleh yayasan-yayasan swasta yang seringnya membiarkan madrasah berkembang sendiri, cari murid sendiri, tapi kalau ada dana bantuan harus masuk yayasan. Akibatnya madrasah-madrasah tadi sulit menjadi besar.

Dari 3 (tiga) data yang telah dipaparkan tadi diperoleh deskripsi tentang karakter kelembagaan madrasah yang secara lebih banyak swasta dan karena itu rata-rata lemah yang di antara sebab-sebab kelemahannya tidak didukung oleh *the holding company* yang dalam hal ini adalah yayasan yang menaungi, yang seharusnya memberikan *support* memadai. Sampai di sini kembali kita bisa bertanya, bagi para informan yang tentu sangat paham dengan karakter mayoritas madrasah yang demikian, apakah mereka masih meyakini pandangan bahwa masa depan madrasah bersifat prospektif? Untuk menebalkan deskripsi kita tentang kelembagaan madrasah, berikut dikemukakan tambahan data lain yang dikutip dari paparan Sofiudin:

... *counter kebudayaan* terhadap kebijakan politik pendidikan pemerintah Hindia Belanda berupa pendirian madrasah di mana-mana pada zaman dulu disertai dengan pendefinisian madrasah sebagai lembaga (formal) pendidikan agama Islam. ... setelah Indonesia merdeka ...era UUSPN No. 20 Th 2003 definisi madrasah sebagai lembaga pendidikan agama sulit dilepaskan. Di sini terjadi semacam kerancuan ... melestarikan ... dikotomi ilmu agama dan ilmu umum. ... madrasah merupakan lembaga pendidikan agama atau lembaga pendidikan umum? ... guru agama yang mengerti umum atau guru umum yang menguasai agama ... ini semua *mberat-mberati* laju perkembangan madrasah.

Paparan Sofiudin yang kental nuansa akademis dan filosofis memantapkan prestasinya sebagai Kepala Madrasah Ibtidaiyah, yang pernah meraih sebagai lulusan terbaik Program S2 IAIN dan guru teladan tingkat nasional. Data terakhir yang disodorkan Sofiudin melengkapi gambaran yang kita peroleh mengenai situasi kelembagaan madrasah. Penggalan penuturan Sofiudin "... ini semua *mberat-mberati* laju perkembangan madrasah," memantulkan pandangannya bahwa situasi rancu tentang *apakah madrasah adalah lembaga pendidikan agama atau lembaga pendidikan umum* telah menghambat gerak madrasah menuju masa depan yang cerah. Pandangan yang sama juga dikembangkan oleh Sri Irawati ketika mengatakan "... Akibatnya madrasah-madrasah tadi sulit menjadi besar" dan Barul yang menyebut rata-rata madrasah mengalami situasi "kelembagaan yang lemah."

5. *Sumberdaya Finansial Madrasah*

Dilihat dari organisasi penyelenggaranya, madrasah diklasifikasi menjadi madrasah negeri dan madrasah swasta madrasah negeri diselenggarakan oleh negara. Sedang madrasah swasta diselenggarakan oleh yayasan swasta atau organisasi masyarakat. Semua madrasah di Indonesia, baik madrasah negeri maupun madrasah swasta dalam pertumbuhan dan perkembangannya dibina oleh Kementerian Agama.

Dilihat dari segi jumlah, madrasah swasta mencapai angka mayoritas jauh melebihi jumlah madrasah negeri untuk semua tingkatan. Jumlah madrasah negeri untuk semua tingkatan mungkin hanya mencapai 10 persen dari jumlah keseluruhan madrasah di Indonesia. Seperti dikatakan Badrul (yang juga disepakati Sri Irawati dan Sofiudin) jumlah madrasah swasta melebihi jumlah madrasah negeri karena

... mayoritas bangsa Indonesia adalah muslim. Segala upaya menyebarkan ilmu, *nasyrul ilm*, termasuk dalam bentuk mendirikan lembaga pendidikan adalah termasuk *fardlu kifayah*. Jadi orang Islam sangat bergairah mendirikan lembaga-lembaga pendidikan. Pertama madrasah kemudian sekolah.

Dalam pandangan para informan, dalam posisinya sebagai lembaga pendidikan yang pembinaannya berada di bawah Kementerian Agama, madrasah memiliki hambatan untuk maju yang disebabkan masalah daya dukung finansial. Pengalaman mereka bertahun-tahun menjadi guru di, dan kemudian memimpin, madrasah menjadikan mereka tahu persis bahwa ketersediaan biaya pendidikan yang besar merupakan salah satu syarat bagi kemajuan madrasah. Pandangan pertama yang peneliti kutip utuh dilontarkan Sofiudin:

... gini ya, dari sudut pandang pemenuhan kebutuhan pembiayaan pendidikan, keberadaan madrasah dalam wilayah pembinaan Kemenag jelas mempersempit potensi masukan keuangan. Hal ini jika kita bandingkan dengan potensi keuangan sekolah melalui Kemendiknas. Ini terjadi untuk madrasah negeri, apalagi madrasah swasta yang jumlahnya mayoritas.

Kemenag kan tidak semata-mata mengurus pendidikan, sehingga dana pemerintah untuk pendidikan melalui Kemenag sangat kecil dibanding dana pemerintah melalui Kemendiknas yang memang khusus mengurus pendidikan. Selisihnya berlipat-lipat susah dihitung lah. Kemudian pada tingkat Kabupaten/Kota, sekolah ditangani Kantor Dindikpora sementara madrasah ditangani unit di dalam kantor Kantor Kemenag Kabupaten/Kota, yaitu Mapenda. Karena tidak seimbang tentu volume dan kapasitas dana yang mengalir tidak seimbang juga. Ini pasti *njomplang* karena tidak seimbang.

Utuk diketahui, ketika seperti sekarang era otonomi dan desentralisasi pendidikan, madrasah dianggap bukan anak kandung Pemda/Pemkot, sehingga bisa dikatakan madrasah tidak pernah diciprati apa-apa oleh Pemda/Pemkot dalam bidang pembiayaan pendidikan. Basah karena dihujangerimisi saja tidak apalagi kuyup dihujanderasi dengan dukungan finansial. Sikap Pemda/Pemkot tidak bisa disebut seratus persen salah karena memang dulu ada Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri No 903/2429/SJ yang melarang pemerintah daerah untuk mengalokasikan APBD kepada organisasi vertikal. Madrasah karena dibina

Kementerian Agama kan jadinya terhitung organisasi vertikal. Kapan majunya kalau begini terus?

Pandangan yang dilontarkan Sofiudin, yang merupakan Kepala Madrasah di MIN, merefleksikan situasi daya dukung financial bagi pembiayaan pendidikan di madrasah negeri. Apa yang tersurat dari pandangan yang dia paparkan, terutama pada bagian akhir, sesungguhnya menyiratkan kegelisahan dia berkaitan dengan masa depan madrasah negeri dipandang dari segi kekuatan keuangan bagi pembiayaan madrasah. Sementara itu Badrul dan Sri Irawati, Kepala Madrasah informan, yang berasal dari madrasah swasta juga mengemukakan pandangannya mengenai masa depan madrasah dilihat dari sudut kekuatan keuangan madrasah. Badrul menjelaskan:

Saya masih ingat dan setuju dengan statemen-statemen *njenengan* di berbagai pelatihan, bahwa harus dibedakan antara pembiayaan pendidikan dengan biaya pendidikan yang dibayarkan peserta didik. Disebutkan bahwa semua satuan pendidikan yang maju didukung oleh pembiayaan pendidikan yang tinggi sementara siswa bisa membayar murah atau bahkan bisa gratis.

Pembiayaan pendidikan oleh rata-rata madrasah swasta selama ini sangat rendah alias tidak mencapai standar minimal pembiayaan pendidikan yang memungkinkan madrasah mampu menyajikan standar minimal pelayanan. Sebabnya sederhana, sumber-sumber keuangan madrasah terlalu kecil. Rata-rata madrasah swasta, termasuk di dalamnya madrasah saya, sumber-sumber keuangannya yang pokok adalah dari wali murid. Sedangkan kita tahu, wali murid madrasah lebih banyak yang berasal dari kelas bawah dan hanya ada beberapa yang kelas menengah.

Pernyataan-pernyataan yang dilontarkan Sofiudin dan Badrul tentang situasi kemampuan keuangan madrasah mengingatkan kita pada karakter-karakter yang menjadi *stereotype* madrasah yang mudah diingat. Mereka adalah (1) rendahnya rata-rata kualitas output pendidikan madrasah, (2) terbatasnya sarana dan parasarana belajar, (3) terbatasnya jumlah guru, (4) rendahnya kualitas guru madrasah, (5) kurangnya kesejahteraan guru, (6) lemahnya kemampuan manajerial kepala madrasah, dan (7) tidak dijadikannya madrasah sebagai pilihan pertama orang tua untuk menitipkan pembinaan anak-anak mereka. Tujuh sifat yang melekat pada madrasah tersebut yang sesungguhnya merupakan mata rantai permasalahan, bak lingkaran setan, melilit madrasah-madrasah kita selama ini, kecuali beberapa madrasah saja, ternyata bersumber dari kondisi keuangan madrasah yang sangat lemah.

Sri Irawati menyodorkan data yang mendukung pernyataan di atas:

Mungkin belum ada riset khusus tentang efek buruk BOS bagi madrasah. Tapi yang jelas terjadi adalah, setelah madrasah kecipratan dana BOS masyarakat kemudian enggan memberikan sumbangan pembiayaan pendidikan madrasah. Anda bisa tidak, mengelola madrasah ibtidaiyah dengan jumlah murid 120an (seratus dua puluhan) jumlah guru 8 (delapan) orang, dengan infaq per siswa per bulan Rp.10.000,-?

Cerita lain yang disampaikan Badrul memperkuat data di atas:

Kami di swasta sebenarnya memiliki yayasan yang memayungi. Seperti masyarakat yang menurun kepeduliannya untuk membantu keuangan madrasah, pengurus yayasan rata-rata madrasah juga sering kurang paham dengan BOS, sehingga kadang-kadang menganggap BOS telah menyelesaikan masalah keuangan madrasah. Mereka tidak malah bergerilya mencari dana untuk pembiayaan pengembangan mutu madrasah, padahal BOS kan untuk kegiatan rutin. Kalau madrasah dan sekolah negeri guru-gurunya digaji negara, madrasah swasta guru-gurunya ya digaji dari uang BOS itu.

Di bagian atas dari paparan data ini terungkap, MAN Insan Cendekia di Serpong menjadi madrasah rujukan dan madrasah tujuan, di antara sebabnya karena dukungan pembiayaan rutin yang fantastis, sekitar 5 milyar rupiah per tahun. Para Kepala Madrasah yang menjadi informan penelitian ini tidak pernah jera menjadi orang madrasah. Namun melalui paparan yang mereka sampaikan mengenai kekuatan pembiayaan pendidikan di madrasah, terutama swasta, mereka menyiratkan masa depan madrasah mereka tidak seindah MAN Insan Cendekia. Perlakuan tidak adil dari pemerintah, baik oleh pemerintahan kolonial maupun pemerintah pasca Indonesia merdeka, yang menyebabkan lemahnya kekuatan finansial madrasah, telah dan akan mengancam masa depan madrasah.

6. *Community Support bagi Madrasah*

Kenyataan bahwa mayoritas madrasah berstatus sebagai madrasah swasta menegaskan bahwa perhatian yang diberikan oleh masyarakat terhadap madrasah sangatlah tinggi. Sebagai lembaga pendidikan yang lahir, tumbuh dan berkembang dalam asuhan masyarakat, madrasah lebih mudah mengintegrasikan lingkungan eksternal mereka ke dalam lingkungan internal mereka. Kemampuan ini jika dikelola dengan benar dan baik berpotensi menciptakan suasana kebersamaan dan kepemilikan yang tinggi dengan keterlibatan yang tinggi dari masyarakat. Sebuah keterlibatan yang didasarkan kepada kepemilikan lingkungan akan melahirkan tanggung jawab sosial yang dahsyat.

Data-data yang diperoleh peneliti mengenai dukungan masyarakat atau *community support* yang diperoleh madrasah menunjukkan, hubungan sejarah dan sentimen keagamaan merupakan *link* yang menghubungkan madrasah dengan masyarakat. Besar kecilnya *support* yang diberikan masyarakat kepada madrasah bergantung kepada kemampuan madrasah memelihara ingatan masyarakat akan hubungan sejarah dan sentimen keagamaan yang menghubungkan masyarakat dengan madrasah. Seperti diungkap Sri Irawati:

Sejak madrasah ini berdiri, setiap hari secara bergilir masyarakat menyediakan makanan dan minuman untuk guru di madrasah kami. Dengan demikian terutama makanan untuk guru dan tenaga kependidikan lain selalu berubah tiap harinya. Aneka buah, kacang goreng, kacang rebus, pisang goreng, tempe goreng, ketela goreng, kue, roti, jagung dan sebagainya sesuai dengan pemberian masyarakat.

Data ini menarik, madrasah tempat Sri Irawati menjadi Kepala Madrasah berdiri sekitar 30 tahun lalu. Selama waktu yang begitu panjang tersebut, seperti dijelaskan Sri Irawati tadi, masyarakat di sana setiap hari terus menerus menyediakan konsumsi makanan dan minuman bagi guru. Satu bentuk kesetiaan dan tanggung jawab yang tak perlu dipertanyakan. Menambahkan kepada data *community support* yang telah disampaikan tadi, Sri Irawati melanjutkan:

Tahun 2010 madrasah kami mendapat bantuan Rp.220.000.000,- untuk rehab fisik dua kelas dan satu ruang perpustakaan. ... menurut penilaian orang PU, melihat hasilnya rehab kelas dan pembangunan ruang perpustakaan seperti itu tidak mungkin seharga dua ratus dua puluh juta karena ada dua wc dan kamar mandi siswa juga. ... menurut standar PU hasil seperti itu katanya sekitar tiga ratusan juta. Kami bisa melakukan karena masyarakat membantu tenaga tidak dibayar, mencarikan pasir dan batu di sungai dan secara bergilir mengirim konsumsi tukang selama pembangunan. ...

Fenomena rasa memiliki oleh masyarakat terhadap madrasah ternyata tidak hanya berlaku di madrasah swasta. Sofiudin mengisahkan, pada saat MI Negeri yang dia pimpin hendak membuat tempat parkir bagi kalangan madrasah dan tamu-tamu, masyarakat sekitar dibawah koordinasi komite madrasah bergotong royong mewujudkannya. Sofiudin menuturkan:

Meskipun sudah menjadi MIN, masyarakat sekitar tempat saya bekerja tidak pernah menghentikan kepedulian mereka kepada madrasah kami. Contoh dekatnya ketika kami membangun arena parkir. Mereka semua yang mengerjakan. Madrasah benar-benar tidak mengeluarkan serupiah pun untuk mewujudkan perluasan arena parkir.

Di lingkungan madrasahny Sri Irawati, organisasi ibu-ibu Muslimat NU pada setiap acara selapanan dan pengajian minggunya masih terus mengumpulkan donasi untuk membantu MI yang dikepalai Sri Irawati. MI tersebut sebenarnya tidak berafiliasi ke Ma'arif karena memiliki yayasan swasta yang memayunginya. Namun begitu, ibu-ibu yang tergabung di Muslimat tadi tetap saja melestarikan support yang telah mereka awali sejak madrasah tersebut tiga puluh tahun lalu. Secara lebih rinci Sri Irawati menuturkan:

Kalau *njenengan* datang ke selapanan ibu-ibu Muslimat di sini, *nejenengan* akan malu kalau tidak membawa uang sumbangan. Mereka yang umumnya istri nelayan saja tidak pernah lupa membawa uang untuk nyumbang madrasah kami.

Pada tingkat kesediaan untuk memberikan *support*, masyarakat yang merupakan basis sosial madrasah tidak diragukan kesetiannya. Pertanyaannya adalah seberapa kuat dukungan yang diterima madrasah dari masyarakat pendukungnya? Penuturan Sofiudin menjadi data yang membantu menjawab pertanyaan tersebut:

Kalau kita menginginkan madrasah memiliki masa depan yang cerah, pertanyaan pentingnya bukan apakah masyarakat mendukung madrasah karena itu sudah pasti. Tetapi bagaimana dukungan itu menjadi signifikan bagi peningkatan kualitas madrasah secara permanen. Di sini harus ditegaskan agar menjadi pengetahuan umum, bahwa masyarakat pendukung madrasah adalah masyarakat pedesaan yang umumnya bukan masyarakat yang berdaya finansial tinggi.

Peringatan Sofiudin tentang perlunya meningkatkan kualitas *community support* agar berdaya guna bagi pencapaian masa depan madrasah yang cerah adalah petunjuk bahwa dalam benak para informan keprospektifan masa depan madrasah memerlukan *high community support*.

7. Sumber Daya Lulusan Madrasah

Karena jumlah madrasah di Indonesia sangat banyak, maka jumlah lulusan madrasah juga mencapai angka yang sangat besar. Dalam konteks upaya perumusan wajah masa depan madrasah, sumber daya lulusan madrasah sangat penting karena salah satu bagian paling depan dari wajah madrasah yang mudah dikenali adalah para lulusannya. Disebut paling depan karena lulusan merupakan sumberdaya (baca: *human resource*) yang dikembalikan untuk "dikonsumsi" masyarakat (pengguna).

Kontribusi sumberdaya lulusan madrasah bagi pembentukan masa depan madrasah yang cerah paling kurang bertumpu pada dua hal. Mereka adalah kualitas lulusan dan kompatibilitas lulusan bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat pengguna. Dalam hal yang pertama, Sri Irawati menyampaikan data:

Tahun 2009/2010, seorang lulusan saya mendapat nilai UAMBN matematika 100 karena benar seratus persen. Untuk tingkat kecamatan, ia telah mengalahkan semua peserta UAMBN tahun itu baik dari SD maupun dari MI.

Mengomentari penuturan Sri Irawati, Sofiudin menimpali:

Sebagai Kepala Madrasah lokal di Jawa Tengah saya tidak memiliki data memadai untuk disampaikan, tetapi ada kutipan berita koran Republika tahun 2006 yang saya simpan ... "Secara nasional pencapaian rata-rata NUN tertinggi tahun 2006 untuk SMA program IPA sebesar 28,97 oleh SMA Negeri 1 Bangil Pasuruan, untuk MA program IPA sebesar 27,57 oleh MA Ibarurrahman Stabat. Peringkat kedua sebesar 28,38 untuk SMAN Genteng dan 27,21 untuk MA Jeumala Amal. Peringkat ketiga sebesar 28,33 oleh SMA Negeri 1 Pandaan dan 27,10 oleh MA Negeri Bangkalan, dan seterusnya. Untuk SMA dan MA jurusan IPS dan bahasa petanya sama saja."

Saya sih yakin aja kalau kualitas madrasah masih bisa bersaing dengan kualitas lulusan sekolah. Masalahnya bagaimana meningkatkan *grade* rata-rata madrasah, bukan hanya satu dua madrasah ...

Pencapaian rata-rata nilai UN siswa madrasah memang lebih rendah daripada siswa sekolah, tetapi terpautnya relatif kecil. Sebenarnya hal ini membanggakan bagi madrasah mengingat madrasah adalah seratus persen (kurikulum) sekolah plus seratus persen (kurikulum) pendidikan agama.

Pernyataan Sofiudin bahwa madrasah sama dengan 100% sekolah ditambah 100% pendidikan agama merupakan data menarik. Nampaknya dalam pandangan para Kepala Madrasah (informan), berkembang penalaran bahwa jika dan hanya jika madrasah sama dengan 100% sekolah maka kualitas lulusan madrasah akan jauh lebih bagus dari kondisi sekarang. Apakah pandangan demikian merupakan beladiri atau kritik substansial terhadap politik pendidikan yang melingkupi madrasah? Dalam hal ini Badrul memiliki pandangan tidak kalah menarik:

Memang ada yang menyindir bahwa pendidikan di madrasah sekarang adalah 'tiruan' dari pendidikan sekolah sehingga lulusannya tidak maksimal. MI adalah SD yang diberi baju agama, MTs dan MA adalah SMP dan SMA yang diberi baju agama. Tidak masalah dengan pandangan negatif seperti itu. ... Faktanya bisa kita lihat, lulusan madrasah lebih diterima dalam arti lebih bermanfaat di masyarakat.

Belum lagi kalau yang kita lihat adalah orang-orang bermasalah di masyarakat, lebih banyak mana lulusan madrasah yang menjadi problem masyarakat dan lulusan sekolah yang menjadi problem masyarakat. Sangat kecil jumlah lulusan masyarakat yang diam tidak bergerak. Mereka menyebar melakukan wirausaha, menjadi guru swasta, tokoh lokal, PNS, Guru/Dosen dan sebagainya.

Badrul seolah mendemonstrasikan logika terbalik, bahwa mengukur kebermanfaatan lulusan madrasah bukan dengan menghitung berapa yang sudah jadi orang, tapi berapa banyak lulusan yang menjadi problem masyarakat. Baru kemudian dia menyodorkan contoh-contoh penyebaran lulusan, yang sebagian besar bukan menjadi pegawai namun bergerak di bidang usaha mandiri. Jika logika Badrul yang diterapkan, maka kemungkinan madrasah memiliki masa depan cerah menjadi semakin nyata. Demikian, karena masyarakat akan menyadari bahwa selama ini lulusan madrasah hampir tidak ada yang bermasalah. Soal tidak diterima menjadi PNS atau pimpinan lembaga formal, toh secara ekonomi masyarakat masa depan adalah masyarakat wirausaha.

Di Balik Gagasan-gagasan para Informan tentang Masa Depan Madrasah

Paparan data lapangan di bagian sebelumnya telah menginformasikan paling kurang terdapat 7 (tujuh) konstruk teoritis yang digunakan para informan penelitian ini pada saat mereka mengungkapkan pandangan-pandangan mereka mengenai masa depan madrasah. *Legal standing* sama dengan sekolah yang diperoleh madrasah era UUSPN No. 20 Th 2003 merupakan konstruk yang melaluinya para informan mengembangkan keyakinan penuh bahwa madrasah memiliki masa depan yang cerah. Tentang mengapa status hukum sama dengan sekolah bagi madrasah dipandang oleh para informan sebagai jaminan prospektifnya madrasah bisa ditemukan alasannya pada penggalan-penggalan kutipan-kutipan berikut:

- a) madrasah merasa berada di zona aman;
- b) madrasah ... bisa mendapat perhatian sama dengan sekolah dari pemerintah yang melaksanakan undang-undang;
- c) madrasah ... memiliki hak untuk diperlakukan sama dengan sekolah tanpa diskriminasi;
- d) selama bertahun-tahun kita di madrasah terjepit;
- e) dipandang sebagai lembaga pendidikan kelas dua;
- f) dalam undang-undang pendidikan tidak disebut sama sekali; dan sekarang
- g) bisa tegak menatap masa depan kita sendiri di madrasah

Dalam pandangan para informan, wajah masa depan madrasah terancam buram lantaran madrasah hingga dewasa ini masih terkungkung oleh kebijakan dualisme pengelolaan pendidikan nasional. Seperti ditemukan dalam penuturan-penuturan mereka, pandangan yang mengkhawatirkan

masa depan madrasah akibat dualisme manajemen pendidikan nasional, mereka bangun di atas argumen sebagai berikut:

- a) tidak pernah menerima perlakuan sama dari pemerintah ... mulai dari alokasi dana, perhatian, pembinaan manajemen, bantuan sumber dan media pembelajaran, penyebaran penempatan guru, hingga pemberian beasiswa masa transisi;
- b) madrasah masih mengalami diskriminasi dari pemerintah;
- c) kebijakan penganggaran dan pendanaan pemerintah terhadap subsidi per kapita bagi siswa madrasah ... para siswa Madrasah Aliyah (MA) hanya satu persen jatah yang diterima siswa SMA;
- d) surat Edaran Mendagri tanggal 21 September 2005 No 903/2429/SJ melarang pemerintah daerah untuk mengalokasikan APBD kepada organisasi vertikal. Karena madrasah berada di bawah koordinasi Kementerian Agama yang termasuk organisasi vertikal;
- e) beban belajar siswa madrasah menjadi lebih berat karena kurikulum madrasah menjadi 100% pelajaran non agama sekolah plus 100% pelajaran agama madrasah. Akibatnya rata-rata prestasi belajar siswa madrasah lebih rendah dibanding rata-rata prestasi belajar siswa sekolah.

Bagi para Kepala Madrasah informan, madrasah bisa berharap memiliki masa depan yang baik karena guru-guru yang ada penuh semangat dan berdedikasi tinggi. Namun mereka juga memandang guru-guru yang tidak kompeten dan tidak kualifaid menyulitkan pengembangan madrasah untuk mencapai masa depan yang baik. Hal ini terkuak dari argumen yang mereka kemukakan seperti:

- a) teman-teman seperjuangan saya di madrasah yang saya pimpin merupakan orang-orang penuh semangat dan berdedikasi tinggi. Meski gaji ... dari yayasan terhitung rendah, yaitu Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per bulan.
- b) ... di MI saya yang gurunya 12 belum memiliki guru lulusan S1 Program Studi PGMI. Mereka yang S1 justru lulusan S1 Bahasa Inggris dan S1 Matematika;
- c) kesulitan memimpin implementasi KTSP yang sebagian besarnya disebabkan karena kondisi guru-guru ... secara kualifikasi memprihatinkan ... belum semua S1 itu pun masih terjadi *mismatch*. ... kesulitan luar biasa pada saat harus menyusun kurikulum sendiri. ... mereka tidak memiliki kompetensi untuk itu ...

Status swasta dari mayoritas madrasah dipandang para informan sebagai mewarisi tradisi "mengimbangi" politik pendidikan pemerintah sejak era Hindia Belanda. Tradisi "mengimbangi" ini telah menyebabkan mayoritas madrasah menjadi jauh dari pemerintah sehingga nampak berkembang sendiri. Selanjutnya tradisi ini secara ideologis telah menjadikan madrasah sulit melepaskan diri dari definisi awalnya sebagai lembaga pendidikan agama sehingga mengalami kerancuan ideologis dan terjebak melestarikan dikotomi ilmu umum-ilmu agama. Sebagai akibatnya sulit menjadi besar dan lambat berkembang.

- a) madrasah ... merupakan respon terhadap kebijakan politik pendidikan pemerintah Hindia Belanda. ... kebanyakan madrasah adalah secara kelembagaan adalah swasta;
- b) jangan tanya yang lain ... secara kelembagaan lemah ... hanya beberapa yang kuat secara kelembagaan;
- c) yayasan-yayasan swasta yang seringnya membiarkan madrasah berkembang sendiri, cari murid sendiri, tapi kalau ada dana bantuan harus masuk yayasan. Akibatnya madrasah-madrasah tadi sulit menjadi besar;
- d) pendefinisian madrasah sebagai ... lembaga pendidikan agama sulit dilepaskan;
- e) kerancuan ... melestarikan ... dikotomi ilmu agama dan ilmu umum. ... madrasah merupakan lembaga pendidikan agama atau lembaga pendidikan umum? ... guru agama yang mengerti umum atau guru umum yang menguasai agama ... ini semua *mberat-mberati* laju perkembangan madrasah.

Para informan memandang sumber daya keuangan madrasah dewasa ini tidak menjanjikan masa depan yang cerah. Pandangan mereka yang demikian didasarkan pada argumen yang ditemukan pada penggalan-penggalan penuturan mereka berikut ini:

- a) keberadaan madrasah dalam wilayah pembinaan Kemenag jelas mempersempit potensi masukan keuangan;
- b) Kemenag kan tidak semata-mata mengurus pendidikan sehingga ... volume dan kapasitas dana yang mengalir tidak seimbang juga. Ini pasti *njomplang* karena tidak seimbang;
- c) ... era otonomi dan desentralisasi pendidikan, madrasah dianggap bukan anak kandung Pemda/Pemkot, sehingga bisa dikatakan madrasah tidak pernah diciprati apa-apa oleh Pemda/Pemkot dalam bidang pembiayaan pendidikan ... Menteri Dalam Negeri ... melarang pemerintah daerah untuk mengalokasikan APBD kepada organisasi vertikal;
- d) Pembiayaan pendidikan oleh rata-rata madrasah swasta selama ini sangat rendah alias tidak mencapai standar minimal pembiayaan pendidikan yang memungkinkan madrasah mampu menyajikan standar minimal pelayanan. Sebabnya ... sumber-sumber keuangan madrasah terlalu kecil. ... yang pokok adalah dari wali murid. ... yang berasal dari kelas bawah dan hanya ada beberapa yang kelas menengah;
- e) Anda bisa tidak, mengelola madrasah ibtidaiyah dengan jumlah murid 120an (seratus dua puluhan) jumlah guru 8 (delapan) orang, dengan infaq per siswa per bulan Rp.10.000,-?

Dukungan yang selama ini diterima madrasah dari masyarakat menurut para informan perlu dinaikkan ke tingkat yang signifikan bagi jaminan kualitas yang permanen. Dalam pandangan para informan, masalahnya adalah mayoritas madrasah berkembang di lingkungan masyarakat mayoritas miskin.

- a) Sejak madrasah ini berdiri, setiap hari secara bergilir masyarakat menyediakan makanan dan minuman untuk guru di madrasah kami;
- b) Kami bisa melakukan karena masyarakat membantu tenaga tidak dibayar, mencarikan pasir dan batu di sungai dan secara bergilir mengirim konsumsi tukang selama pembangunan;
- c) Madrasah benar-benar tidak mengeluarkan serupiah pun untuk mewujudkan perluasan arena parkir;
- d) Mereka yang umumnya istri nelayan saja tidak pernah lupa membawa uang untuk nyumbang madrasah kami;
- e) Kalau kita menginginkan madrasah memiliki masa depan yang cerah, ... bagaimana dukungan itu menjadi signifikan bagi peningkatan kualitas madrasah secara permanen. ... masyarakat pendukung madrasah adalah masyarakat pedesaan yang umumnya bukan masyarakat yang berdaya finansial tinggi.

Para Kepala Madrasah informan memandang sumberdaya lulusan madrasah berkontribusi positif terhadap masa depan madrasah karena menurut mereka, pada faktanya:

- a) Tahun 2009/2010, seorang lulusan saya mendapat nilai UAMBN matematika 100 karena benar seratus persen. Untuk tingkat kecamatan, ia telah mengalahkan semua peserta UAMBN tahun itu baik dari SD maupun dari MI;
- b) Saya sih yakin aja kalau kualitas madrasah masih bisa bersaing dengan kualitas lulusan sekolah. Masalahnya bagaimana meningkatkan *grade* rata-rata madrasah, bukan hanya satu dua madrasah ...
- c) Pencapaian rata-rata nilai UN siswa madrasah memang lebih rendah daripada siswa sekolah, tetapi terpautnya relatif kecil. Sebenarnya hal ini membanggakan bagi madrasah mengingat madrasah adalah seratus persen (kurikulum) sekolah plus seratus persen (kurikulum) pendidikan agama.

SIMPULAN DAN SARAN

Pada akhirnya, dari deskripsi tebal yang terpapar dalam penuturan-penuturan para Kepala Madrasah informan kita menjadi memahami bahwa para Para Kepala Madrasah informan memiliki pandangan meyakinkan bahwa masa depan madrasah akan semakin kuat dan prospektif. Pandangan ini mereka kembangkan berdasar pada fakta madrasah memiliki: (1) *legal standing* sebagai sama dengan sekolah di mata hukum, seperti termaktub dalam UUSPN Nomor 20 Tahun 2003; (2) dukungan riil yang diberikan masyarakat kepada madrasah selama ini bersifat total; (3) semangat dan ketulusan serta dedikasi tinggi para gurunya; dan (4) potensi daya serap masyarakat yang tinggi terhadap sumberdaya lulusan madrasah meski prestasi sumber daya lulusan madrasah masih sedikit kalah dengan prestasi lulusan sekolah.

Selanjutnya para Kepala Madrasah informan juga berpandangan, masa depan madrasah terancam. Argumen yang mereka bangun bagi pandangan ini adalah: (1) kungkungan dualisme pengelolaan pendidikan nasional di bawah naungan Kendiknas dan Kemenag; (2) sumberdaya tenaga pendidik secara umum yang tidak kualifaid, *mismatch* dan tidak kompeten; (3) sumberdaya finansial madrasah yang lemah; (4) status kelembagaan yang melahirkan kerancuan dan dikotomi madrasah sebagai lembaga pendidikan agama atau lembaga pendidikan umum.

Selanjutnya dari pemahaman yang diperoleh secara substantif bisa diteorikan, atau paling kurang dikembangkan hipotesis, madrasah bisa berkembang maju di bawah kondisi-kondisi (1) mendapat perlindungan undang-undang, (2) bebas dari dualisme pengelolaan pendidikan nasional, dan (3) bebas dari kerancuan ideologis ilmu umum ilmu agama. Akhirnya disarankan agar para peneliti lain bisa melanjutkan penelitian ini dengan penelitian yang memiliki cakupan lebih luas sehingga diperoleh generalisasi untuk pengembangan teori formal tentang madrasah.

DAFTAR PUSTAKA

- Balitbang Kemendiknas. 2000. *Statistik Satuan Pendidikan di Indonesia, Sekolah dan Madrasah*. Jakarta: Kantor Kementerian Pendidikan Nasional.
- Bastian, Aulia Reza. 2007. *Reformasi Pendidikan*. Yogyakarta: LAPERA Pustaka Utama.
- Kementerian Agama. 2007. *Statistik Madrasah*. Jakarta: Kementerian Agama RI.
- Maksum. 1999. *Madrasah: Sejarah dan Perkembangannya*. Jakarta: Logos.
- Rahim, Husni. 2008. *Pengakuan Madrasah sebagai Sekolah Umum (Berciri Khas Islam)*. Jakarta: Makalah Seminar Nasional tidak diterbitkan.
- Steenbrik, Karel. 1994. *Pesantren, Madrasah, Sekolah: Pendidikan Islam dalam Kurun Modern*. Jakarta: LP3ES.
- Sulistiorini. 2006. Telaah Historis Epistemologis Sistem Pendidikan di Indonesia sejak Zaman Hindu hingga Kemerdekaan. *Sosio-Religia: Jurnal Ilmu Agama dan Ilmu Sosial* (Vol. 5, No. 3, Mei 2006).
- Supriyoko, Ki. 18 Maret 2008. Problema Besar Madrasah. *Harian Republika*.